

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, fenomena kemiskinan masih menjadi pembicaraan hangat, dimana fenomena ini menyebabkan pemerintah memfokuskan diri untuk menyelesaikannya (Ayu, 2018). Umumnya penduduk miskin bermukim di desa-desa yang memiliki akses terbatas. Kemiskinan sendiri di definisikan sebagai sebuah kondisi yang menyebabkan seseorang sulit dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan ialah perkembangan sektor ekonomi tidak merata atau menjadi sektor basis, hal ini mengakibatkan distribusi pendapatan masih belum menyentuh batas pendapatan normal. Kemiskinan juga didorong oleh masyarakat yang berkulitas hidup rendah serta banyaknya masyarakat yang masih menganggur.

Menurut Witjaksono 2009 (dalam Kurniawan, 2013) Pembangunan ekonomi ialah salah satu upaya yang diterapkan di sebuah negara ataupun daerah yang dimana tujuannya ialah mensejahterakan masyarakatnya. Pengukuran akan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ialah dengan langkah membandingkan banyaknya hasil produksi disetiap tahunnya. Dalam proses pembangunan ekonomi ketersediaan Sumber Data Manusia (SDM) Sumber Daya Alam (SDA) serta teknologi merupakan elemen penting yang harus ada di dalamnya.

Salah satu target dari dilakukannya pembangunan ekonomi ialah menekan angka kemiskinan, Menurut M.Nasir 2008 (dalam Ayu, 2018), permasalahan kemiskinan ialah permasalahan yang rumit dan disebabkan dari banyak faktor, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini, seluruh aspek di dalam masyarakat harus dibenahi dan proses penyelesaiannya dilakukan secara terpadu.

Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang menjadi pusat dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan fakta tersebut, seharusnya masyarakat yang tinggal di pulau Jawa tidak mengalami kesulitan dari segi ekonomi, akan tetapi kenyataan di lapangan sangatlah berbalik, dimana kemiskinan ialah permasalahan utama yang dihadapi oleh pulau Jawa. Sebagai pulau dengan jumlah penduduk yang banyak, pada tahun 2019 pulau Jawa menempati posisi sebagai pulau yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu sejumlah 12,56 juta jiwa dari 150,4 juta jiwa tergolong sebagai masyarakat miskin (Databoks, 2020). Dari data Publikasi Statistik yang dirilis BPS, sebaran jumlah penduduk miskin yang terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur

Grafik 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (juta jiwa)



Sumber : BPS Jawa Timur

Grafik 1.2 : PresentasePenduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (%)

Sumber : BPS Jawa Timur

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 4,40 juta jiwa dengan presentase penduduk miskin 11,20%, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,33 juta jiwa dengan presentase penduduk miskin 10,85% dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 4,29 juta jiwa dengan presentase penduduk miskin 10,20% (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020). Presentase Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur masih relatif tinggi, dimana dalam tiga tahun terakhir presentase nya masih diatas 10%, hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga masih relatif tinggi.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan daerah industri dengan memiliki ratusan industri dari skala besar hingga *home industry* tentunya mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di Kabupaten Gresik, sehingga dengan banyaknya lapangan pekerjaan diharapkan mampu menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik. Tetapi pada kenyataanya Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik masih tinggi

Grafik 1.3 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (ribu jiwa)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Grafik 1.4 : Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (%)

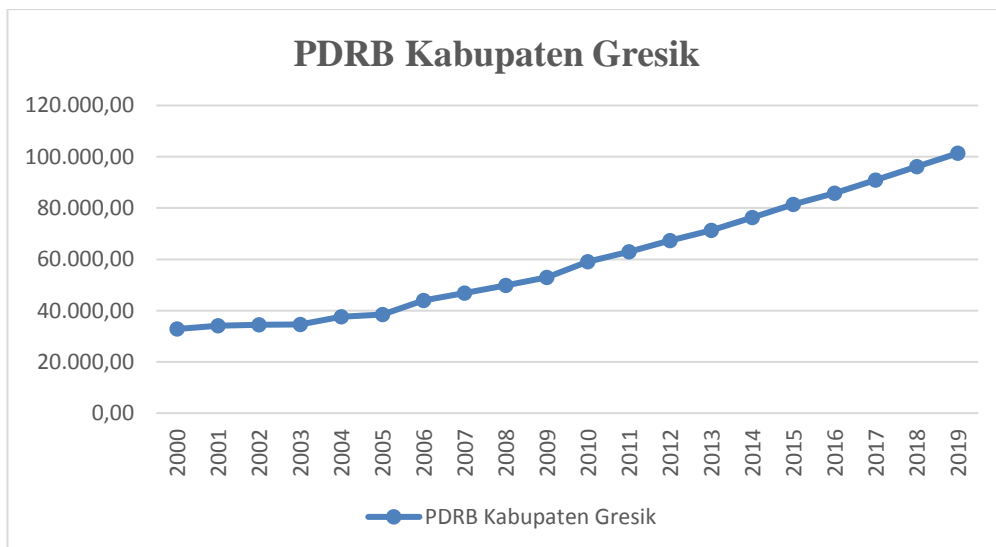
Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Tercatat dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik mencapai 164 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin 12,80%, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 154 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin 11,89%, dan pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik sebesar 148 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin 11,35% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2020). Jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, Kabupaten Gresik memang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 ke 2018

menurun sebesar 0,06% dan pada tahun 2018 ke 2019 menurun sebesar 0,04%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan presentase jumlah penduduk miskin Provinsi maka Kabupaten Gresik tergolong memiliki kemiskinan yang masih relatif tinggi, dimana presentase penduduk miskin Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir masih diatas presentase provinsi. Hal ini sesuai dengan ungkapan wakil DPRD Kabupaten Gresik dalam pernyataan berita :

“Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk hanya 1,4 juta. Namun, angka kemiskinan masih 12,8 persen. Artinya, ada sekitar 168 ribu warga yang masuk kategori miskin. Bahkan, angka kemiskinan di Gresik masih kalah dibandingkan dengan Jombang dan Mojokerto yang hanya kisaran 9 persen.” (Radarsurabaya, 2018)

Grafik 1.5 : PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2000-2019 (Milyar Rupiah)

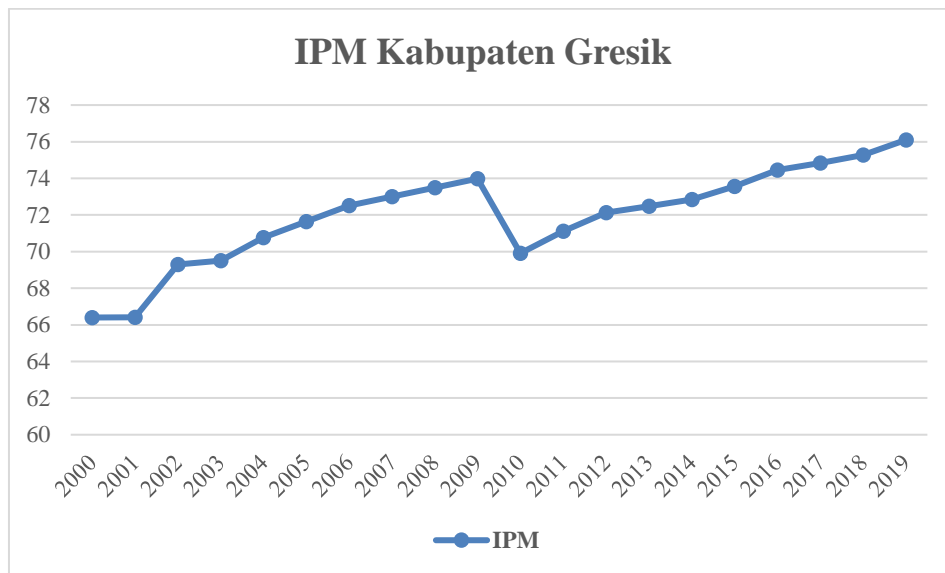


Sumber : (BPS Kabupaten Gresik, 2020)

Dengan meninjau pergerakan PDRB yang dimiliki sebuah daerah, maka akan diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2000 sampai 2019 meningkat. Dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 nilai PDRB Kabupaten Gresik sebesar Rp90.855,60 pada

tahun berikutnya yaitu tahun 2018 nilai PDRB Kabupaten Gresik meningkat menjadi sebesar Rp96.131,61 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp101.346,55. Nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan di setiap tahunnya, walaupun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Gresik masih sangatlah tinggi.

Grafik 1.6 : IPM Kabupaten Gresik Tahun 2000-2019 (%)



Sumber : (BPS Kabupaten Gresik, 2020)

Salah satu faktor pendorong kemiskinan ialah kualitas dari sumber daya manusia yang dapat ditinjau melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah sangat rendah, maka daerah tersebut kesulitan dalam menjalankan produksi sehingga pendapatan di daerah tersebut cenderung rendah. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di suatu daerah masih sangatlah banyak (Ayu, 2018).

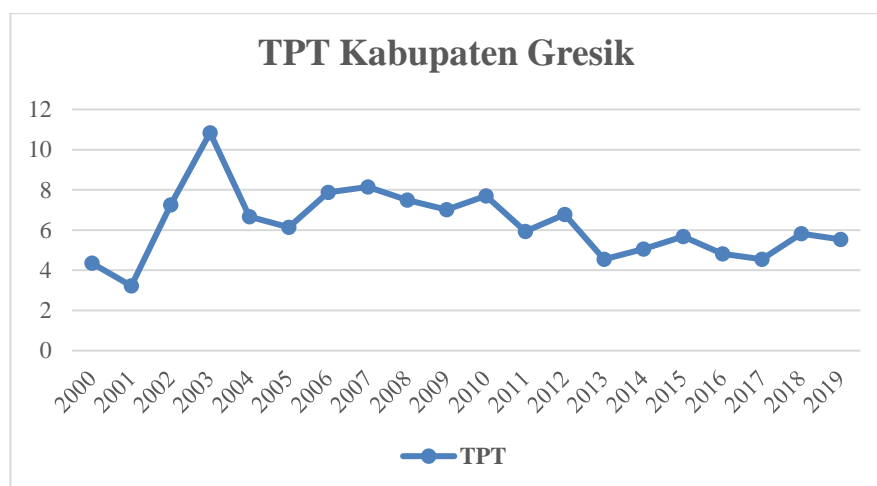
Dari Grafik data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat bahwa pada tahun 2000 sampai 2019 IPM Kabupaten Gresik berfluktuasi. Dalam tiga tahun terakhir IPM Kabupaten Gresik mengalami peningkatan

setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. pada tahun 2017 IPM Kabupaten Gresik sebesar 74,84%, dan meningkat menjadi 75,28% pada tahun 2018. Hingga tahun 2019 tercatat angka IPM Kabupaten Gresik sebesar 76,1%. Dengan peningkatan IPM, maka sumber daya manusia akan semakin berkualitas dimana hal ini dapat berdampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik.

Faktor yang juga dapat menyebabkan kemiskinan di suatu daerah ialah pengangguran.

Anggapan Lewis terkait negara berkembang ialah banyaknya jumlah tenaga kerja akan tetapi modal yang dimiliki sangatlah sedikit, minimnya tempat untuk menjalankan usaha, terjadi kesenjangan di dalam jumlah sumber daya manusia terhadap modal dan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan tingkat produksi di negara berkembang cenderung kecil bahkan nyaris menyentuh angka nol. Fenomena membludaknya tenaga kerja akan tetapi lapangan kerja yang tersedia sangatlah sedikit inilah yang diindikasikan sebagai pengangguran (Amalia, 2012).

Grafik 1.7 : TPT Kabupaten Gresik Tahun 2000-2019 (%)



Sumber : (BPS Kabupaten Gresik, 2020)

Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik dari tahun 2000 sampai 2019 juga berfluktuasi. Dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 tingkat pengangguran

terbuka sebesar 4,54%, dan meningkat menjadi 5,82% pada tahun 2018. Tercatat pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik sebesar 5,54%, angka ini turun dari tingkat pengangguran terbuka tahun sebelumnya. Naik turunnya tingkat pengangguran terbuka berdampak pada penambahan atau penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik. Sehingga penurunan angka tingkat pengangguran terbuka diperlukan setiap tahunnya karena akan memberi dampak positif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dari ketiga Grafik diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir nilai PDRB meningkat setiap tahunnya, IPM juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, peningkatan IPM diikuti oleh penurunan TPT Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir meskipun pada tahun 2018 TPT Kabupaten Gresik meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi peningkatannya tidak begitu signifikan. Sehingga dengan Peningkatan PDRB, IPM, dan penurunan TPT dalam tiga tahun terakhir akan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi atau menurunkan Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang termasuk ke dalam Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gresik masih tergolong tinggi. Upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Gresik dinilai belum berhasil, sehingga peneliti menilai bahwa penelitian terkait faktor yang menyebabkan Kabupaten Gresik dilanda fenomena kemiskinan patut dilaksanakan. Dengan mengetahui faktor penyebab dan pendorong

fenomena kemiskinan di Kabupaten Gresik, maka upaya dalam membentuk kebijakan baru yang lebih efektif dapat dilakukan, sehingga kemiskinan yang melanda Kabupaten Gresik dapat teratasi. Sesuai dengan pemaparan inilah, penulis berkeinginan untuk melangsungkan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik ?
2. Apakah IPM berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik ?
3. Apakah TPT berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah PDRB berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah IPM berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah TPT berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh dari PDRB, IPM, dan TPT terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Gresik penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan juga diharapkan mampu untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di masa yang akan datang untuk mengatasi dari masalah Jumlah Penduduk Miskin.